

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008).
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 & 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, 1992.
- AP Parlingungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- AP Parlingungan, *Komentar Atas UUPA*, Mandar Maju, 1998.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 1994.
- Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, RajaGrafindo Persada, 1994.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, 2010.
- Urip Santoso, *Hukum Hak Atas Tanah*, Kencana, 2015.
- Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, 2012.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.

JURNAL

- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Sudantra, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2019.
- Putu Sastra Wibawa, "Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan," *Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol. 15 No. 2, 2019.
- Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023.
- Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum,"

Notary Law Journal, 2025.

Rina Yulianti, "Pelaksanaan Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2020.

Ahmad Fikri, "Pemecahan Sertipikat Tanah dalam Praktik Jual Beli Perumahan," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9 No. 3, 2021.

Dwi Putra Jaya, "Kepastian Hukum dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Riska Ananda, "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020.

Hendra Wijaya, "Implementasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan UUPA," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Nanda Prasetyo, "Kepastian Hukum Pemecahan Sertipikat Tanah," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2021.

Eka Susanti, "Persyaratan Administratif dalam Pemecahan Sertipikat Tanah," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Yogi Saputra, "Analisis Yuridis Pemecahan Sertipikat Tanah," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 8 No. 3, 2020.

M. Ridwan, "Perlindungan Kreditur terhadap Tanah yang Dibebeani Hak Tanggungan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.

Sri Wahyuni, "Prosedur Pemecahan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.

Fajar Nugroho, "Pentingnya Pengukuran dalam Pendaftaran Tanah," *Jurnal Pertanahan*, Vol. 10 No. 2, 2019.

Rahmat Hidayat, "Alih Fungsi Lahan dan Permasalahan Pertanahan dalam Pembangunan Perumahan," *Jurnal Rechtsregel*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Andi Hamzah, "Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8 No. 2, 2020.

Dwi Putra Jaya, "Penataan Ruang dan Perlindungan Kawasan Pertanian," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2020.

Dwi Putra Jaya, "Perlindungan Lahan Pertanian dalam Perspektif Tata Ruang," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2020.

Budi Santoso, "Perlindungan Lahan Pertanian dan Ket

ahanan Pangan Nasional,"

Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Indonesia, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Indonesia, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemecahan dan Penggabungan Bidang Tanah.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010–2030.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 459/K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975. Pengadilan Niaga Padang, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Pdg.

SUMBER INTERNET, LAPORAN, DOKUMEN RESMI

Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Padang Dalam Angka 2023*, 2023.

Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, *Laporan Tahunan Pelayanan Sertifikasi*.